

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Saat ini demokrasi menjadi suatu wacana yang sangat menarik untuk diperbincangkan dan menjadi suatu isu utama dalam tataran sosial politik dunia, karena demokrasi dianggap sebagai suatu sistem yang mengedepankan hak asasi manusia dan menjunjung nilai-nilai humanisme, demokrasi yang sejak tahun 90-an berkembang pesat masih terasa sampai abad 21 ini, gelombang demokratisasi melanda hampir seluruh belahan benua di dunia, tidak terkecuali di dunia Arab, khususnya Mesir

Selama ini, Mesir berada dibawah pemerintahan yang bersifat otoriter, dan para pemimpin tersebut berasal dari kalangan militer. Mesir berada di bawah pemerintahan Presiden Muhammad Najib (1952-1954), Presiden Gamal Abdul Naser (1954-1970) dan Anwar Sadat (1970-1981) dan Hosni Mubarak (1981-sekarang). Dibawah kepemimpinan para rezim tersebut, Mesir sangat jauh dari kriteria negara demokratis, pemilu yang ada hanya menjadi *procedural formal* para rezim tersebut untuk melegitimasi kekuasaan mereka, masih adanya larangan terhadap kelompok tertentu untuk aktif dalam politik dan tidak adanya suksesi kepemimpinan yang reguler dan teratur.

Setelah berkuasa di Mesir selama lebih dari 24 tahun, pada bulan Februari 2005 secara mengejutkan Presiden Hosni Mubarak meminta Parlemen Mesir untuk

mengamandemen pasal 76 Konstitusi Mesir, pasal tersebut mengatur tentang sistem pemilu, presiden Hosni Mubarak mengusulkan pemilihan presiden dengan banyak calon (multikandidat). Selama ini, Presiden Mesir dipilih oleh parlemen dan kemudian nama calon presiden yang disetujui parlemen itu diajukan kepada rakyat untuk diminta persetujuannya melalui referendum. Partai Nasional Demokrasi (NDP) pimpinan Hosni Mubarak yang menguasai kursi parlemen selama ini, selalu mengajukan nama Hosni Mubarak sebagai calon tunggal dan selalu berhasil memenangkan pemilihan selama lebih dari 23 tahun.

Dengan diadakannya pemilu multikandidat, berarti memberi peluang bagi calon lain untuk mengikuti pemilu presiden, hal tersebut tentu saja akan merugikan Hosni Mubarak jika tidak terpilih sebagai presiden kembali. Inisiatif perubahan tersebut menurut Hosni Mubarak datang dari inisiatif pribadinya untuk membawa Mesir menjadi negara yang lebih demokratis. Akhirnya pada tanggal 25 Mei 2005 yang lalu, melalui sebuah referendum di tingkat rakyat sebagian besar rakyat yang ikut referendum setuju diamandemen pasal 76 tersebut.

Dengan diadakannya pemilu multikandidat untuk pertama kalinya pada tanggal 7 September 2005 lalu, dan kembali terpilihnya presiden Hosni Mubarak sebagai presiden Mesir mungkinkah akan membawa Mesir menjadi negara yang lebih demokratis atau pemilu kali ini sama saja dengan pemilu-pemilu sebelumnya, dan proses demokrasi yang terjadi di Mesir hanya sekedar prosedur formal?

Menurut Hosni Mubarak Mesir sedang menuju ke arah transisi demokrasi, perubahan yang dilakukan untuk menjadikan Mesir sebagai negara demokratis akan

bener-bener terwujud ? hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat **“Transisi Demokrasi Mesir di bawah Pemerintahan Presiden Hosni Mubarak”** sebagai judul skripsi.

B. TUJUAN PENULISAN

Dalam hal ini tujuan penulisan adalah

- Sebagai wahana penulis mengasah kemampuan menganalisa persoalan politik.
- Untuk memperdalam pengetahuan penulis pada proses demokrasi yang terjadi di Mesir.
- Mengaplikasikan teori yang dipelajari di bangku kuliah.
- Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1) dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik jurusan ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Mesir merupakan negara yang berada di kawasan Timur Tengah, wilayahnya terletak antara benua Asia dengan benua Afrika, Mesir memiliki letak yang strategis karena menjadi penghubung antara benua Asia dengan Afrika. Di Timur Tengah Mesir memiliki posisi yang cukup penting karena merupakan salah satu negara pendiri Liga Arab. Hubungan Mesir dengan negara-negara Arab menjadi tegang pada

masa pemerintahan presiden Anwar Sadat, dikarenakan Anwar Sadat melakukan perjanjian damai dengan Israel.

Menurut konstitusi Mesir 1971, Mesir merupakan negara republik dengan nama resmi Republik Rakyat Arab Mesir (Jumhuriyat Misr Al-Arabiyah). Pada tahun 1952 para perwira militer melakukan kudeta dan mengambil alih kekuasaan, sejak saat itu Mesir berada dibawah rezim militer, sejak presiden Muhammad Najib (1952-1954), presiden Gamal Abdul Nasser (1954-1970), presiden Anwar Sadat (1970-1981) dan presiden Hosni Mubarak (1981-sekarang). Di bawah pemerintahan para rezim militer tersebut, Mesir sangat jauh dari kriteria negara demokratis.

Hosni Mubarak terpilih sebagai presiden pada tahun 1981, setelah terbunuhnya presiden Anwar Sadat. Pada saat itu Hosni Mubarak menjabat sebagai wakil presiden dan wakil ketua Partai Nasional Demokrasi, Partai Nasional Demokrasi merupakan partai pemerintah dan menguasai sebagian besar suara dalam Parlemen Mesir.

Hosni Mubarak ternyata tidak berbeda dengan para presiden-presiden Mesir sebelumnya, kehidupan demokrasi tidak berjalan, dimana tidak adanya sirkulasi kekuasaan yang teratur dan reguler, kekuasaan presiden masih sangat kuat, sistem pemilu yang mencegah munculnya tokoh oposisi yang potensial mengalahkan penguasa dan lain-lain. Selama lebih dari 24 tahun Hosni Mubarak menjadi presiden dan menguasai sistem politik Mesir dengan Partai Nasional Demokrasi yang

Pada bulan Februari 2005 lalu, secara mengejutkan Hosni Mubarak meminta Parlemen Mesir untuk mengamandemen Pasal 76 Konstitusi Mesir, pasal tersebut mengatur tentang mekanisme pemilihan presiden. Pro dan kontra atas usulan Hosni Mubarak umumnya datang dari kelompok oposisi, walau bagaimanapun, dengan amandemen tersebut akan memberi peluang kepada para calon dari kelompok oposisi untuk ikut bersaing pada pemilu.

Isi Pasal 76 Konstitusi Mesir sebelum amandemen adalah :

1. Dewan Perwakilan Rakyat mencalonkan para kandidat presiden.
2. Setiap calon harus mendapatkan minimal sepertiga sokongan suara Dewan.
3. Voting Dewan untuk memilih kandidat tunggal.
4. Kandidat terpilih diajukan kepada rakyat untuk disetujui dalam sebuah pemungutan
5. Jika kandidat tersebut mendapatkan suara mayoritas dalam pemungutan suara, dia disumpah sebagai presiden.
6. Jika tidak, proses pemilihan diulang dari awal.

Sedangkan usulan amandemen yang diusulkan oleh Hosni Mubarak adalah :

1. Setiap partai yang telah berdiri lebih dari lima tahun dan menguasai minimal lima persen kursi di Dewan, boleh mengajukan calonnya untuk menjadi kandidat presiden.
2. Calon independen minimal harus mendapat rekomendasi dari 65 orang anggota Dewan, 25 anggota Majelis Syura, dan anggota DPRD dari minimal 14 provinsi. Mesir mempunyai 26 wilayah setingkat provinsi

3. Kandidat yang memenuhi syarat kemudian diajukan untuk dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Sebelum amandemen tersebut bisa diterapkan, usulan amandemen tersebut diajukan ke Parlemen, sebagian besar anggota parlemen menyetujui usulan amandemen tersebut. Setelah disetujui oleh parlemen kemudian diajukan kepada rakyat melalui referendum nasional, hasil referendum menunjukkan sebagian besar rakyat yang ikut referendum menyetujui usulan amandemen tersebut.

Dengan disetujuinya amandemen tersebut, berarti akan mengubah sistem pemilihan presiden di Mesir, selama ini sistem pemilu menggunakan sistem referendum dimana rakyat hanya diminta persetujuannya dengan pilihan “ iya ” atau “ tidak “. Setelah amandemen sistem pemilu akan memberi pilihan kepada rakyat untuk memilih calon sesuai dengan keinginan mereka. Pemilu sendiri dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 7 September 2005.

Pemilu multikandidat pertama di Mesir diikuti oleh beberapa calon diantaranya adalah : *Incumbent* presiden Hosni Mubarak yang dicalonkan oleh Partai Demokrasi Nasional (NDP), Ibrahim Tork dari Partai Uni Demokrasi, Noaman Gomaa dari Partai *Wafd*, Ayman Nour dari Partai *Al Ghad*, Osama Shaltout dari Partai Solidaritas, Fawzi Ghazal dari Partai Mesir 2000, Ahmed Al Sabahi dari Partai *Ummah*, Mamdouh Qenawi dari Partai Konstitusi Sosialis dan refaat Al Agroudy dari Partai Kesepakatan.¹

¹ <http://www.kemlu.go.id/pressroom/press/0500/06/05-092005.htm> diakses tanggal 7 September 2005

Para calon presiden tersebut melakukan kampanye untuk meraih dukungan dari rakyat Mesir mulai sejak tanggal 17 Agustus sampai tanggal 4 September 2005, pamflet-pamflet dan foto-foto para kandidat dengan berbagai ukuran menghiasi kota-kota di Mesir, berbagai cara dan media yang digunakan para calon dalam kampanye mereka seperti kampanyenya presiden Hosni Mubarak dalam sebuah fotonya di Kairo yang sedang berdiri didepan jet tempur MIG atau saat ia dipelantaran sebuah mesjid atau disebuah gereja Koptik, poster tersebut ditunjukkan kepada rakyat Mesir bahwa Hosni Mubarak toleransi dalam beragama. Tema utama kampanye Hosni Mubarak sendiri pada pemilu multikandidat pertama ini adalah pengalamannya memerintah dan menjaga stabilitas.² Sedangkan para kandidat yang merupakan lawan Hosni Mubarak menyuarakan janji-janji yang hampir sama, yaitu janji reformasi ekonomi, perhatian kepada masalah pengangguran, peningkatan penghasilan, dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Setelah kampanye pemilu dilakukan oleh para calon presiden berlangsung selama 18 hari, dan semua kandidat bisa berkampanye secara bebas dan diberi jatah kampanye sama di televisi, akhirnya pada hari rabu tanggal 7 September 2005 diadakan pemilihan presiden multikandidat pertama di Mesir, sejak pukul 08.00 waktu setempat sekitar 10 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah dibuka, sebagai tempat bagi rakyat Mesir untuk menyalurkan aspirasi politik mereka.

²http://www.bbc.com/uk/Inhonian News/story/2005/09/050904_egyptpresiden.html

Pada hari jum'at malam tanggal 9 September 2005, hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Ketua Pemilihan Umum Mesir, yang juga merupakan seorang Hakim Agung Mamdouh Marie. Dimana Hosni Mubarak menempati urutan pertama dengan meraih 88,6 persen suara atau 6.316.786 dari 7.305.063 suara yang masuk, urutan kedua diduduki kandidat dari Partai Al Ghad, Ayman Nour, dengan meraih 540.405 suara atau 7,6 persen suara dan urutan ketiga ditempati oleh Noaman Gomaa yang merupakan kandidat dari partai Al Wafd dengan memperoleh 208.891 suara atau 2,9 persen.³

Dengan tetap terpilihnya Hosni Mubarak sebagai presiden Mesir, dengan sistem baru yang lebih demokratis dimana diikuti oleh banyak calon, seharusnya kehidupan demokrasi di Mesir akan menjadi lebih baik.

D. Pokok Permasalahan

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut : Mengapa kemenangan Hosni Mubarak paska pemilu tidak meningkatkan kualitas demokrasi di Mesir ?

E. Kerangka Dasar Teori

Untuk membantu menjelaskan pokok permasalahan diatas, penulis menggunakan teori dalam ilmu hubungan internasional yaitu :

1. Teori Demokrasi

Samuel P. Huntington menyebutkan adanya beberapa faktor yang menghambat demokrasi terwujud di beberapa negara. Faktor-faktor tersebut dapat dibagi dalam tiga kategori besar. Yang pertama adalah politik, yakni tidak adanya pengalaman dengan demokrasi pada kebanyakan negara yang masih otoriter di tahun 1990-an dan para pemimpin yang menciptakan rezim otoriter atau yang tetap berkuasa untuk waktu lama dalam rezim-rezim semacam itu, biasanya menjadi kaum konservatif yang gigih menentang demokratisasi. Kedua adalah faktor budaya, tradisi-tradisi budaya yang sangat bervariasi dan tidak demokratis tentunya akan menghambat penyebaran-penyebaran demokrasi di dalam masyarakat. Ketiga adalah faktor ekonomi, kemiskinan merupakan suatu penghalang utama demokrasi di suatu negara karena demokrasi sangat tergantung pada perkembangan ekonomi di suatu negara⁴

Dilihat dari faktor-faktor diatas, maka terlihat bagaimana terhambatnya proses demokrasi di Mesir, dalam bidang politik amandemen konstitusi yang terbatas, dimana masih kuatnya pengaruh presiden Hosni Mubarak dalam perpolitikan Mesir, pemilu yang tidak adil dan jujur, tindakan pemerintah terhadap kelompok oposisi yang refresif. Budaya sebagian masyarakat Mesir yang menghendaki pemerintahan pusat yang kuat meskipun tidak demokratis, hal ini disebabkan oleh kelangsungan hidup rakyat Mesir yang sekitar 70% tinggal di sepanjang sungai Nil, dan sangat

¹² Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1995, hal. 147

bergantung pada Sungai Nil yang hulunya berada di Ethopia dan melintas Sudan sebelum sampai Mesir, hanya pemerintahan yang kuat bisa menjamin kontinuitas aliran Sungai Nil.

Kelompok militan pada bulan Juli 2005 yang lalu melakukan serangan bom dikota Sharm el Sheikh yang merupakan kota wisatawan, sehingga investor cenderung untuk tidak menanam modal di negeri piramid ini karena instabilitas politik, yang efeknya akan semakin memperburuk kondisi ekonomi Mesir, pemilu yang seharusnya menjadi instrumen penting bagi penegakan stabilitas politik dan pembaruan ekonomi hanya akan mendapatkan hasil yang tidak menentu.

Untuk mengukur perekonomian suatu negara digunakan beberapa indikator, diantaranya adalah *Gross domestic product* (GDP). Dari tahun 1999 Gross Domestic Product (GDP) Mesir terus mengalami penurunan, pada tahun 1999 GDP Mesir mencapai 93.1 miliar dollar, dengan tingkat pertumbuhan 5.1 persen, namun pada tahun 2004 GDP hanya mencapai 77 miliar dollar dengan tingkat pertumbuhan hanya 4 persen.

Sementara itu, Robert A. Dahl mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah sistem politik. Yakni, sistem politik yang sepenuhnya responsif terhadap semua warga negara.⁵

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara demokrasi jika memenuhi syarat sebagai berikut:

¹³ Robert A. Dahl, *Polyarchy: Participation and Opposition*, New Heaven, Yale University Press, 1971, hal.2

1. Jika sarana tindakan pemaksaan dengan kekerasan dinetralkan.
2. Jika negara itu memiliki suatu masyarakat majemuk yang dinamis dan modern.
3. Jika kekuasaan pemerintahan tidak hanya terpusat kepada kepala negara saja, tetapi wakil presiden atau perdana menteri tetap memiliki kekuasaan.
4. Adanya Pemilu yang jujur dan adil.
5. Jika negara itu secara budaya homogen atau heterogen, tidak terbagi-bagi dalam beberapa sub kultur yang kuat dan berbeda atau jika terbagi-bagi seperti itu, para pemimpin harus berhasil dalam menciptakan suatu tatanan.
6. Konsosiasional untuk mengatur konflik-konflik sub kultur.
7. Jika negara itu tidak mengalami intervensi dari pihak negara luar yang anti demokrasi.⁶

Bila dilihat dari beberapa faktor diatas maka Mesir belum bisa dikatakan sepenuhnya demokrasi karena tidak memenuhi beberapa persyaratan yang diajukan Dahl tersebut, ini bisa dilihat dimana masih dilakukan tindakan kekerasan dengan kebijakannya yang refresif dan ofensif terhadap kelompok oposisi, masih kuatnya kekuasaan yang dimiliki oleh presiden Hosni Mubarak, sehingga wakil presiden tidak memiliki kekuasaan yang cukup kuat. Dan pemilu multikandidat ternyata tidak menjadi pemilu yang sepenuhnya adil dan demokratis.

¹⁴ Robert A. Dahl, *Demokrasi dan Para Demokratisnya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 86

2. Teori Transisi

Sebuah tanda tipikal dimulainya suatu masa transisi adalah dimana pemerintah otoriter dengan alasan apapun mulai memodifikasi peraturan-peraturan mereka sendiri sebagai jaminan yang lebih kuat bagi hak-hak individu dan kelompok, proses tersebut disebut sebagai liberalisasi.⁷

Samuel P. Huntington menyebutkan bahwa terjadinya proses transisi demokrasi dari rezim-rezim non demokratis dapat melalui 4 proses, yaitu:

1. *Transformasi* atau *Reforma*, dimana elit penguasa mengambil prakarsa memimpin upaya demokratisasi.
2. *Replacemnet* atau *Ruptura*, dimana kelompok oposisi memimpin perjuangan menuju demokrasi.
3. *Transplacement* atau *Ruptforma*, dimana demokratisasi berlangsung sebagai akibat negosiasi dan *bargaining* antara pemerintah dengan kelompok oposisi.
4. *Intervensi*, yang jarang terjadi yaitu dimana lembaga-lembaga demokratis dibentuk dan dipaksakan berlakunya oleh aktor dari luar.⁸

Dari empat proses tersebut, transisi demokrasi yang terjadi di Mesir termasuk dalam katagori tranformasi atau reforma, yaitu proses demokrasi terjadi ketika elit berkuasa memelopori proses perwujudan demokrasi, ini ditandai dengan diamandemennya pasal 76 konstitusi Mesir, ini mengubah akan sistem pemilu, dari

⁷ George Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi, proses dan prospek dalam sebuah dunia yang sedang berubah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003 hal.108.

⁸ Samuel P. Huntington, "Globalisasi Demokratisasi Ketiga" Jakarta, Grafiti Press, 2000.

refrendum menjadi sistem yang lebih demokratis, yaitu sistem multikandidat dengan diberinya peluang calon lain untuk ikut dalam pemilu.

Menurut Gulermo O.Donnell, sebuah proses transisi menuju demokrasi ini dibutuhkan prasyarat yang harus dipenuhi yakni :⁹

1. Keberhasilan *recovery of economy*
2. Keberhasilan kelompok-kelompok pembaharu dalam menduduki posisi-posisi penting dalam kekuasaan yang baru lewat pemilu.
3. Keberhasilan dalam mendapatkan dukungan dari kelas menengah dan masyarakat sipil.
4. Dukungan dari pihak-pihak luar yang berpengaruh dalam kebijakan ekonomi, politik dan keamanan.

Bila dilihat dari faktor-faktor tersebut, maka transisi demokrasi di Meisir tidak bisa dikatakan berhasil sepenuhnya, dikarenakan, keadaan ekonomi yang tidak juga menunjukkan perbaikan, pemilu dengan sistem multikandidat ternyata tidak bisa membuat kelompok oposisi meraih kemenangan, dan rezim Mubarak dapat berkuasa lagi, dukungan dari masyarakat menengah yang tidak signifikan karena berbagai

peraturan yang ditetapkan oleh

F. Hipotesis

Dari latar belakang masalah dan teori-teori yang telah dijelaskan maka didapat jawaban sementara atau hipotesis yaitu : kualitas demokrasi di Mesir tidak bisa berjalan maksimal karena adanya faktor-faktor penghambat seperti :

A. Politik, dalam bidang politik berupa :

1. Kebijakan Hosni Mubrak yang refresif dan ofensif.
2. Amandemen Kostitusi yang terbatas dan kuatnya kekuasaan presiden.
2. Pemilu yang tidak adil dan jujur

B. Budaya. Budaya politik yang tidak berubah

C. Ekonomi. Ekonomi yang tidak menunjukkan perbaikan.

G. Metodologi Penulisan dan Pengumpulan Data

Dalam Ilmu Hubungan Internasional seringkali ditemukan kesulitan dalam teknik meneliti permasalahan internasional yang dikarenakan adanya jarak, kompleksitas masalah, dan lain-lain. Sehingga penulisan ini bersifat *anobservasi researach* dan bersifat deskriptif.

Data-data yang akan digunakan dalam penulisan karya tulis ini diperoleh melalui studi pustaka. Studi ini diperoleh untuk mendapat landasan teori beserta data-

data sekunder dengan metode *deskriptif* dan *kuantitatif*.

permasalahan. Data-data tersebut diperoleh melalui buku-buku literatur, jurnal-jurnal di Internet dan CD-Rom, dan tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

H. Jangkauan Penelitian

Agar pembahasan tidak meluas dan penyelesaiannya lebih kongkrit, maka penulis menggunakan batasan terhadap penelitian ini. Batasan waktu yang digunakan penulis adalah terpilihnya Hosni Mubarak pada tahun 1999 sampai pada tahun 2005.

I. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan, dalam karya tulis ini penulis membagi kedalam Lima Bab dengan uraian sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memuat alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar teori, hipotesa, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua, mengemukakan gambaran umum tentang Mesir secara singkat namun padat agar diperoleh gambaran secara komprehensif tentang Mesir, seperti

keadaan politik selama ini di Mesir di bawah pemerintahan presiden Hosni Mubarak.

Bab ketiga, mengemukakan proses transisi demokrasi yang digagas oleh Hosni Mubarak serta keseluruhan proses Pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 7 September 2005 yang dimenangkan oleh Hosni Mubarak.

Bab keempat, merupakan analisa terhadap Transisi demokrasi yang terjadi di Mesir dan hambatan-hambatannya.

Bab kelima, merupakan Bab akhir yang menutup karya tulis ini, yang berisi rangkuman dari bab-bab sebelumnya serta disusun dalam bentuk kesimpulan.